

ANALISIS KUALITAS PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DALAM WEBSITE PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu)

Septem Al Asyari¹, Herlina Helmy²

¹Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: alasyaris@gmail.com

Abstract: *The research aims to determine the extent of the quality of local government websites in regencies / cities in Bengkulu and the provision of website services that are transparent, accountable, and accessibility. The research approach used is quantitative-descriptive. Documentation, literature, and interviews are used in the process of collecting data using scoring analysis techniques. The results of this research showed: (1) the quality of local government websites in districts / cities in Bengkulu is still low (2) the low causative factor of local government websites is the limited information on the website especially financial information and the lack of evaluation conducted by the government (3) steps that can be taken in order to overcome these obstacles, namely regular training of human resources in the management of local government website, evaluation of website development, and application of sanctions on local government websites that are not in accordance with standards.*

Keywords: *good government; websites quality; transparency; accountability; accessibility.*

How to cite (APA 6th style):

Asyari, S.A & Helmy, Herlina. (2020). Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), Seri C, 2314-2330.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 pengertian *good governance* ialah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dengan melakukan beberapa langkah, salah satunya penerapan *e-government*.

Menurut World Bank definisi *e-government* yaitu penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Sedangkan menurut Indrajit (2002) *e-government* merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah

dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) yang bertujuan memperbaiki mutu kualitas pelayanan.

Adapun tujuan dari penerapan *e-government* menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003 yaitu, pertama pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat, tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau. Kedua, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Ketiga, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta menyediakan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Keempat, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah otonom daerah. Salah satu pilihan yang dilakukan pemerintah adalah dengan penggunaan teknologi informasi melalui media *Website*.

Website adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet berupa teks, gambar, suara, maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (*link*) satu dokumen lainnya (*hypertext*) yang dapat diakses melalui sebuah *browser* (Kadir, 2005). *Web* adalah sebutan bagi sekelompok halaman *web*, yaitu umumnya merupakan bagian dari suatu nama domain (*domain name*) atau subdomain di WWW (*World Wide Web*) di internet. Pemanfaatan *website* oleh pemerintah diharapkan mempermudah bagi para *stakeholders* untuk berinteraksi dengan pemerintah, dan bertujuan memberikan pelayanan kepada publik serta menjadi sarana menyampaikan berbagai informasi yang akurat dan cepat yang dibutuhkan oleh publik.

Di Indonesia hampir seluruh pemerintah daerah memiliki *website* resmi. Namun tidak semua pemerintah daerah memanfaatkan secara maksimal penggunaan *website* dalam meningkatkan kegiatan pelayanan publik, sosialisasi peraturan dan sebagai media komunikasi interaktif kepada publik. Fenomena tersebut juga terjadi di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dalam riset Agustin (2014) menemukan bahwa belum seluruh pemkab/pemkot di propinsi Sumatera Barat memanfaatkan menu transparansi pengelolaan anggaran (TPA) dalam *website* resmi pemerintah daerah untuk mempublikasikan secara lengkap dan konsisten jenis dokumen-dokumen terkait dengan penggunaan anggaran. Meskipun sebagian besar *website* Kabupaten di Sumatera Barat telah terdapat menu khusus/link bernama TPA (transparansi pengelolaan anggaran) untuk mendownload informasi atau dokumen keuangan dan kinerja tetapi menu khusus dan link tersebut terkadang kosong, tidak memuat secara lengkap, dan tidak dipublikasikan secara konsisten setiap tahunnya.

Bahkan riset Agustin dan Arza (2019) menemukan anomali antara akuntabilitas dan transparansi publik terkait dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas publik telah meningkat dalam 7 tahun terakhir (2012-2019), dimana seluruh pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat mempublikasikan pada *website* resmi maupun media massa setiap opini WTP dari BPK atas LKPD. Namun perilaku serupa tidak terjadi dalam konteks transparansi publik, dimana hampir setengah dari 19 pemerintah kabupaten/kota di propinsi Sumatera Barat yang bersedia mengungkapkan secara terbatas dokumen-dokumen terkait pengelolaan anggaran daerah (hanya 5-7 dokumen dari total 12 dokumen).

Hasil penelitian Khasanah, dkk (2017) menunjukkan bahwa 85% atau 412 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia telah memiliki *website* resmi. Sementara sisanya sebesar 15% atau 74 pemerintah daerah belum memiliki *website* resmi. Kualitas *website* yang baik harus memenuhi beberapa kriteria. Pertama, menurut Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 *website* harus memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua, menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, *website* menyajikan informasi kepada publik secara terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Apabila semua kriteria terpenuhi, maka *website* pemerintah daerah dapat dikatakan berkualitas.

Informasi yang disajikan melalui *website* merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas amanat atau kewenangan yang diberikan oleh masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan teori keagenan, yaitu adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Informasi yang dibutuhkan oleh institusi publik atas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah informasi kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan dan informasi perencanaan dan penganggaran. Tidak hanya itu, laporan keuangan pemerintah daerah juga harus berkualitas yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat di pahami oleh penggunaannya. Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan memiliki dampak ekonomis dan substansial dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, baik pihak eksekutif maupun legislatif sama-sama berkepentingan untuk memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah memberikan penjelasan yang memadai mengenai kepatuhan terhadap aturan, informasi kinerja, informasi kondisi keuangan, serta informasi perencanaan dan penganggaran (Novia et.al, 2015).

Teori keagenan menjelaskan hubungan yang muncul ketika satu pihak (prinsipal) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain (agen) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Pihak prinsipal adalah masyarakat, sedangkan agen yaitu pemerintah daerah. Implikasi dari adanya teori keagenan menjelaskan masyarakat sebagai prinsipal pemerintah perlu terlibat secara langsung dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan agennya (Khasanah dkk, 2017). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengungkapkan dan menyajikan informasi secara terbuka (transparansi), dapat dipertanggungjawabkan (akuntabilitas), dan masyarakat diberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tersebut (aksesibilitas).

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009). Transparansi memungkinkan publik untuk melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan yang telah dibuat serta laporan pertanggungjawaban pemerintah tahun lalu. Dalam hal transparansi, publik memiliki hak terhadap pemerintah, yaitu: (1) hak untuk mengetahui (*right to know*) yakni mengetahui kebijakan pemerintah serta alasan dilakukannya suatu kebijakan atau keputusan tersebut, (2) hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) meliputi hak untuk diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik, dan (3) hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kegagalan atau keberhasilan kinerja suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dan dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009). Menurut Mardiasmo akuntabilitas publik ada 2 (dua) macam, yaitu: (1) akuntabilitas vertikal, merupakan pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah

pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR; (2) akuntabilitas horizontal, yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas mempunyai kaitan satu sama lain. Jika pemerintah daerah telah transparan maka harus ada pertanggungjawaban yang baik sehingga publik memperoleh suatu kejelasan dan tidak keraguan.

Selain dituntut untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah daerah juga harus memberikan aksesibilitas kepada masyarakat. Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Menurut Sagala (2011) aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk memperoleh informasi dengan mudah dan biaya yang murah. Publik memiliki hak untuk diberi informasi (*right to be informed*) yang meliputi hak diberi penjelasan secara terbuka, karena hal ini sudah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. Laporan keuangan yang disajikan dalam *website* adalah hak publik yang harus diberikan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemanfaatan *website* sebagai wujud dari penerapan *e-government* di Bengkulu belumlah optimal. Pemerintah daerah Bengkulu belum secara maksimal mengelola *website* dengan baik. Informasi yang disajikan kurang *up to date*, minimnya informasi layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Bengkulu belum secara transparan dan akuntabel dalam menyajikan informasi kepada masyarakat, khususnya informasi pelaporan keuangan. Hasil penelitian Khasanah, dkk (2017) menemukan bahwa rata-rata nilai aksesibilitas *Internet Financial Reporting* (IFR) dari 20 pemerintah daerah yang dijadikan sampel yaitu sebesar 6,20. Nilai tertinggi sebesar 9 diperoleh pemerintah kota Banda Aceh dan Jakarta, sementara itu terdapat 9 pemerintah daerah yang mendapatkan nilai paling rendah dibawah rata-rata sebesar 5 yaitu: pemerintah kota Palembang, Bengkulu, Yogyakarta, Serang, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Palu dan Ambon.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk menguji dan menganalisis kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah daerah dengan menilai transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah di dalam situs *website* resmi. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian tentang “Analisis Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah di Bengkulu”. Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana kualitas *website* pemerintah daerah dari segi pengukuran/penilaian transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas yang ada pada kabupaten/kota di Bengkulu.

REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agensi adalah hubungan yang muncul ketika satu pihak (prinsipal) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada lain (agen) untuk melakukan pengambilan keputusan sesuai kepentingan principal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam teori agensi ada dua pihak yang terlibat, yaitu pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat atau kewenangan atas sesuatu kepada pihak lain. Sedangkan pihak agen yakni pihak yang menerima mandat atau kewenangan dan bertanggung jawab kepada pihak principal.

Berdasarkan teori keagenan, masyarakat dan pemerintah daerah memiliki hubungan prinsipal dan agen. Pihak prinsipal adalah masyarakat, sedangkan pihak agen yaitu pemerintah daerah. Masyarakat (prinsipal) memberikan amanat atau kewenangan kepada pemerintah daerah (agen) untuk dapat menjalankan pemerintahan. Pemerintah daerah (agen) juga punya tanggung jawab kepada masyarakat (prinsipal) untuk melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan semua aktivitas yang telah dilaksanakan dalam suatu periode. Maka demikian, masyarakat dapat menilai dan mengawasi sejauhmana pemerintah menjalankan amanat demi kepentingan masyarakat (prinsipal).

Signaling Theory

Menurut Brigham dan Houston (2001) isyarat atau *signal* adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal yang diberikan berupa informasi tentang apa saja yang telah dilakukan manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang disampaikan oleh perusahaan adalah hal yang penting, karena berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan. Hal tersebut dianggap penting karena berkaitan dengan penyajian informasi keadaan masa lalu, masa sekarang sampai dengan masa yang akan datang mengenai kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana dampaknya pada perusahaan.

Pada sektor publik, teori sinyal menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah ingin menunjukkan sinyal kepada masyarakat dengan cara menyampaikan laporan keuangan yang berkualitas, mengungkapkan informasi lebih lengkap dan menjelaskan lebih detail dalam *website* (Puspita dan Martani, 2012). Teori sinyal erat hubungannya dengan ketersediaan informasi. Laporan keuangan yang diungkapkan kepada publik hendaknya memuat informasi yang relevan dan dianggap penting untuk diketahui. Informasi yang disampaikan harus mencerminkan kinerja pemerintah daerah yang sebenarnya. Sehingga publik dapat mengukur transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kualitas Website

Pengertian kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tingkat bagus atau buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. *website* berarti tingkat baik atau buruknya, tingkat karakteristik yang melekat pada *website* dalam hal memberikan pelayanan kepada publik atas informasi yang dibutuhkan. Adapun penilaian kualitas *website* dilihat dari tingkat aksesibilitas, transparansi dan akuntabilitas. Penilaian tersebut berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 yakni *website* yang berkualitas apabila sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kemudian berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa perlunya aksesibilitas publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi

Transparansi adalah salah satu prinsip yang ada di dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2009) transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Transparansi suatu kebebasan bagi publik untuk dapat mengakses baik informasi politik maupun ekonomi beserta keputusan-keputusannya.

Menurut Martani (2013) untuk mengukur transparansi suatu *website* dapat dilihat melalui beberapa kriteria, sebagai berikut:

- 1) Informasi mengenai kegiatan pemerintah meliputi adanya rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).
- 2) Informasi mengenai laporan kinerja pemerintah yakni terdiri dari Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan pemerintah daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah.
- 3) Informasi mengenai laporan keuangan pemerintah meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2009) akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawabannya, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewajiban untuk menerima pertanggungjawaban tersebut. Menurut Martani (2013) dan Krina (2003) penilaian akuntabilitas dapat dilihat apakah *website* pemerintah daerah menyajikan:

- 1) Laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- 2) Laporan dana hibah dan bansos
- 3) Laporan keuangan tepat waktu
- 4) Adanya pemeriksaan oleh BPK RI

Aksesibilitas

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Sedangkan menurut Sagala (2011) aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) untuk memperoleh informasi keuangan dengan mudah dan biaya yang murah.

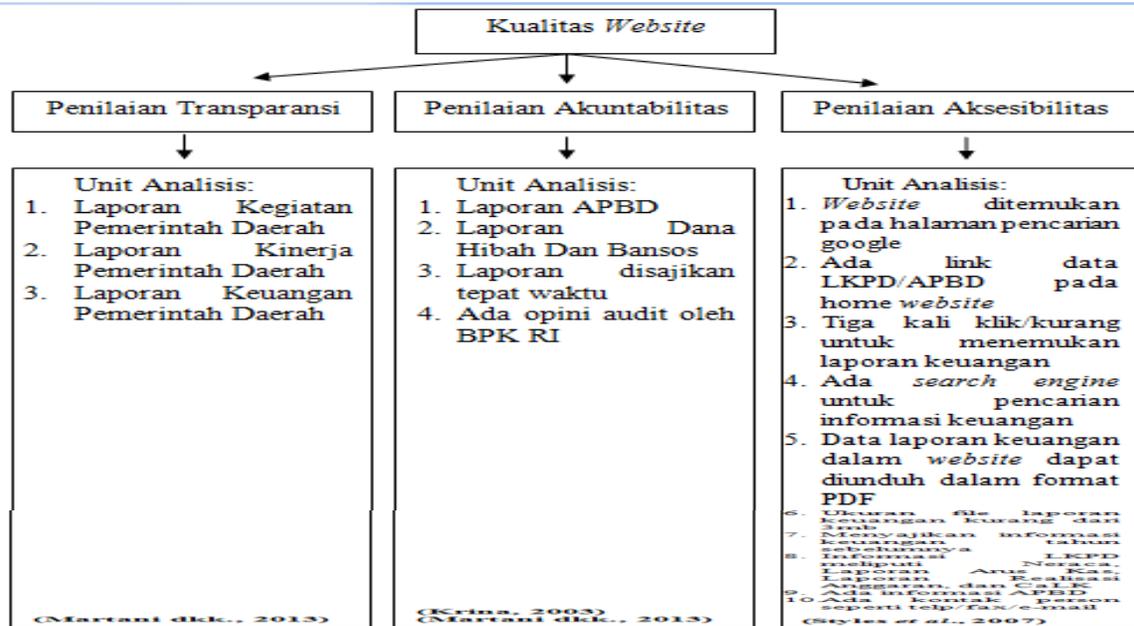
Berikut indikator penilaian tingkat aksesibilitas laporan keuangan dilihat dari penyajian dalam *website* (Styles *et al.*, 2007):

- 1) Apakah *website* pemerintah daerah dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian google dengan mengetik nama pemerintah kabupaten/kota.
- 2) Terdapat link data informasi keuangan seperti LKPD atau APBD pada halaman depan (*home website*).
- 3) Diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat laporan keuangan dalam *website* pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Ada *search engine* untuk melakukan pencarian informasi keuangan
- 5) Data laporan keuangan dalam *website* dapat diunduh dalam format PDF
- 6) Ukuran file laporan keuangan yang dapat diunduh kurang dari 3mb
- 7) Menyajikan informasi laporan keuangan tahun sebelumnya dalam *website* pemerintah kabupaten/kota
- 8) Informasi LKPD lengkap meliputi Neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, CaLK
- 9) Informasi Anggaran pendapatan belanja daerah
- 10) Ada informasi contact person seperti telepon/fax/e-mail untuk mendapatkan data informasi keuangan

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

:



Gambar 1

Kerangka Konseptual Penilaian/Pengukuran Kualitas Website

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Paradigma kuantitatif atau penelitian kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik (Indriantoro & Supomo, 1999). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi disaat sekarang. Dalam penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut (Noor, 2011).

Penelitian ini menggunakan metode skoring untuk mengukur penilaian kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam website pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu. Analisis skor yaitu proses menilai alternatif kebijakan menggunakan indikator-indikator untuk menilai (memberi skor) alternatif-alternatif kebijakan yang telah dikembangkan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, dan bila diperlukan memberikan pembobotan pada indikator yang telah dinilai lebih penting. Tahap-tahap penelitian ini adalah :

1. Melakukan skoring untuk setiap unit analisis pada website
2. Melakukan skoring untu isi (*content*) penilaian transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas
3. Melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Dinas Kominfo dan Badan Keuangan Daerah

Tabel 1
Pengukuran Transparansi Konten Website

No.	Unit Analisis	Kategori	Sumber Rujukan
1.	Kegiatan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Pendek • Transparansi Rencana Pembangunan Jangka Panjang 	Martani dkk, 2013
2.	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) • Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) • Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 	
3.	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Neraca/Laporan Posisi Keuangan • Laporan Realisasi Anggaran • Laporan Arus Kas • Catatan Atas Laporan Keuangan 	

Pada tabel 2 tercantum penilaian untuk mengukur transparansi *website* pemerintah kabupaten/kota. *Website* yang dikatakan transparan apabila menyajikan informasi secara terbuka sehingga publik secara bebas dapat memperoleh informasi keuangan melalui *website* resmi pemerintah kabupaten/kota. Adapun kriteria yang ditetapkan untuk menilai transparansi dalam *website* pemerintah kabupaten/kota yaitu adanya keterbukaan informasi mengenai kegiatan pemerintah, laporan kinerja pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 2
Pengukuran Akuntabilitas Konten Website

No.	Unit Analisis	Sumber Rujukan
1.	Menyajikan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	Martani dkk, 2013
2.	Menyajikan laporan dana hibah dan bansos	Krina, 2003
3.	Laporan keuangan tepat waktu	Krina, 2003
4.	Audit keuangan oleh BPK	Krina, 2003

Penilaian pada tabel 3 yaitu untuk melihat akuntabilitas pemerintah kabupaten/kota dalam *website* resmi. Akuntabilitas yaitu suatu pertanggungjawaban pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dalam suatu periodik. Adapun penilaian akuntabilitas dalam *website* pemerintah kabupaten/kota yaitu melihat penyajian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), laporan dana hibah dan bansos, laporan keuangan disajikan tepat waktu dan adanya audit keuangan oleh BPK.

Tabel 3
Pengukuran Aksesibilitas Konten *Website*

No.	Unit Analisis	Sumber Rujukan
1.	<i>Website</i> pemerintah kabupaten/kota dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian google dengan mengetik nama pemerintah daerah	Styles <i>et al</i> , 2007
2.	Terdapat link data informasi keuangan seperti LKPD atau APBD pada halaman pertama depan (<i>home</i>) <i>Website</i>	
3.	Diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat laporan keuangan dalam <i>Website</i> pemerintah kabupaten/kota	
4.	Ada <i>search engine</i> untuk melakukan pencarian informasi keuangan	
5.	Data laporan keuangan dalam <i>Website</i> dapat diunduh dalam format PDF	
6.	Ukuran file laporan keuangan yang dapat diunduh kurang dari 3mb	
7.	Menyajikan informasi laporan keuangan tahun sebelumnya dalam <i>website</i> pemerintah kabupaten/kota	
8.	Informasi LKPD lengkap meliputi neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan CaLK	
9.	Informasi APBD	
10.	Ada informasi <i>contact person</i> seperti telepon/fax/e-mail untuk mendapatkan data informasi keuangan	

Tabel 4 adalah kriteria penilaian aksesibilitas pada *website*. Aksesibilitas adalah kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik untuk memperoleh informasi keuangan yang disajikan dalam *website* resmi secara berkala. Kriteria penilaian meliputi kemudahan menemukan *website* resmi pemerintah kabupaten/kota pada halaman pencarian *google* dengan mengetik nama pemerintah daerah, terdapat link data informasi keuangan seperti LKPD dan APBD pada halaman depan (*home*) *website*, ada *search engine* untuk melakukan pencarian informasi keuangan, pengguna hanya perlu tiga kali klik atau kurang untuk melihat laporan keuangan dalam *website*, data laporan keuangan dapat diunduh, ukuran file laporan keuangan kurang dari 3mb, adanya laporan keuangan tahun sebelumnya, terdapat komponen LKPD terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan dan APBD, serta menampilkan *contact person* seperti telepon/e-mail/fax.

Dalam melakukan perhitungan, peneliti mengamati masing-masing *website* untuk menilai kualitas pengungkapan laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Bengkulu berdasarkan kriteria-kriteria penilaian yang ada. Jika informasi tersedia maka akan diberi nilai 1, namun jika tidak tersedia akan diberi nilai 0.

Tabel 4
Penilaian Kualitas Website

Skor	Transparansi	Akuntabilitas	Aksesibilitas
0-25	Tidak Transparan	Tidak Akuntabilitas	Tidak Aksesibilitas
26-50	Kurang Transparan	Kurang Akuntabilitas	Kurang Aksesibilitas
51-75	Cukup Transparan	Cukup Akuntabilitas	Cukup Aksesibilitas
76-100	Transparan	Akuntabilitas	Aksesibilitas

(Sumber: Sulistiyo, 2008)

Tabel diatas yakni standarisasi unit analisis untuk memberikan penilaian kualitas pengungkapan laporan keuangan dalam *website* pemerintah kabupaten/kota provinsi Bengkulu. Menurut Dana Sulistiyo, dkk (2008) dalam melakukan perhitungan penilaian, akan diberikan skor tertentu yang mengacu pada analisis skala penilaian sebagai berikut:

Rumus Perhitungan Skor :

$$\text{Bobot Skor} = \frac{\text{Jumlah Skor yang diperoleh}}{\text{Total Skor}} \times 100\%$$

Setelah tahap skoring, unit analisis penelitian akan dideskripsikan sesuai hasil analisis pada setiap *website* pemerintah kabupaten/kota provinsi Bengkulu. Kemudian melihat sejauhmana pemerintah kabupaten/kota Bengkulu meningkatkan *e-government* dengan memanfaatkan *website* dan apa saja tantangan atau kendala yang dihadapi. Terakhir, peneliti akan membuat kasimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019. Penelitian dilakukan pada *webstie* pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. Ada 10 kabupaten/kota di Bengkulu, terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota madya. 10 kabupaten/kota tersebut, semua link *website* pemerintah dapat diakses sehingga semuanya dapat diteliti. Penelitian ini menggunakan 3 pengukuran atau penilaian kualitas *website*, yaitu pertama pengukuran transparansi terdiri dari 9 unit analisis, kedua pengukuran akuntabilitas terdiri dari 4 unit analisis, dan terakhir pengukuran aksesibilitas terdiri dari 10 unit analisis. Total seluruh penilaian unit analisis dari pengukuran kualitas *website* pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu adalah 23 unit analisis. Berikut adalah hasil dari pengukuran kualitas *website* pemerintah daerah pada 10 kabupaten/kota yang ada di Bengkulu.

Tabel 5
Hasil Persentase Penilaian Keseluruhan Kualitas Website
Kabupaten/Kota Bengkulu

No	Website Pemda	Transparansi	Akuntabilitas	Aksesibilitas	Bobot Skor Keseluruhan	Penilaian
1	Kota Bengkulu	13,04%	0%	30,43%	43,48%	Kurang Berkualitas
2	Bengkulu Utara	13,04%	8,7%	34,78%	56,52%	Cukup Berkualitas

No	Website Pemda	Transparansi	Akuntabilitas	Aksesibilitas	Bobot Skor Keseluruhan	Penilaian
3	Bengkulu Tengah	4,35%	4,35%	13,04%	21,74%	Tidak Berkualitas
4	Bengkulu Selatan	4,35%	0%	13,04%	17,39%	Tidak Berkualitas
5	Seluma	4,35%	0%	13,04%	17,39%	Tidak Berkualitas
6	Kaur	4,35%	0%	8,7%	13,04%	Tidak Berkualitas
7	Muko-Muko	8,7%	0%	13,04%	21,74%	Tidak Berkualitas
8	Kepahiang	4,35%	0%	13,04%	17,39%	Tidak Berkualitas
9	Rejang Lebong	4,35%	0%	13,04%	17,39%	Tidak Berkualitas
10	Lebong	21,74%	4,35%	26,09%	52,17%	Cukup Berkualitas

(Sumber: Data Penelitian yang diolah, 2019)

Seluruh kabupaten/kota di Bengkulu sudah mempunyai *website* resmi pemerintah daerah, namun rata-rata belum ada pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai *website* berkualitas. Dilihat dari masing-masing aspek penilaian, tidak ada penilaian yang baik (berkualitas) atau masih berada dibawah 75%. Pada tabel 10 diatas terlihat bahwa *website* pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh skor tertinggi dengan nilai persentase 56,52% (cukup berkualitas), menyajikan 13 informasi dari total 23 item penilaian. Pemerintah kabupaten Kaur memperoleh bobot penilaian paling rendah dengan persentase 13,04% (tidak berkualitas), hanya mampu menyajikan 3 informasi dari total 23 item penilaian.

Pemerintah daerah kabupaten Rejang Lebong tidak menyajikan satupun item penilaian *website* untuk aspek pengukuran transparansi. Untuk pengukuran akuntabilitas hampir semua pemerintah daerah di Bengkulu tidak menyajikan informasi atau item penilaian ke *website* pemerintah daerah, diantaranya yaitu Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Rejang Lebong. Terakhir, pengukuran atau penilaian aksesibilitas rata-rata pemerintah daerah sudah menyajikan unit analisis atau item penilaian namun belum menyediakan secara keseluruhan.

Berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 yakni *website* yang berkualitas apabila sesuai dengan prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Kemudian berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa perlunya aksesibilitas publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya laporan keuangan pemerintah daerah.

Transparansi

Pengukuran/penilaian transparansi pada kabupaten/kota di Bengkulu tidak ada satupun *website* pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian berkualitas. Hal ini menunjukkan rendahnya pengungkapan informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah dan juga perkembangan *website* masih lambat. Pemerintah daerah belum mengoptimalkan pemanfaatan media *website* untuk mengungkapkan informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Salah satu kendala belum optimalnya pengungkapan informasi keuangan yaitu ketidaktahuan dan

kurangnya sosialisasi kebijakan terkait publikasi informasi keuangan dalam *website* pemerintah daerah, sesuai pernyataan informan berikut :

“Kalau sampai sekarang setahu saya belum ada publikasi laporan keuangan. Proses publikasinya saya kurang tahu pasti siapa yang mengunduh, apakah pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) atau Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)”
(Ibu M dari BKD Kabupaten Bengkulu Tengah)

Selain itu kendala lainnya yang menyebabkan banyak SKPD yang belum publikasi laporan keuangan ialah pemerintah daerah beranggapan bahwa laporan keuangan bukanlah informasi yang wajib dipublikasi secara berkala, seperti kutipan wawancara berikut:

“Setahu saya penyebab utamanya tidak ada kewajiban untuk mengupload (laporan keuangan) ke *website*. Kedua, kebijakan di daerah juga tidak ada atau dari Diskominfo juga tidak ada yang meminta. Sebetulnya bukan kita tidak mau (unduh LKPD) tetapi karena kita tidak tahu. Kemudian juga tidak ada aturan baku apa saja yang harus diupload, tidak ada rinciannya. Kalau tidak terukur, kita susah juga.” (Bapak J dari BKD Kabupaten Kepahiang)

Akuntabilitas

Hasil pengukuran/penilaian akuntabilitas pada *website* pemerintah kabupaten/kota di Bengkulu masih rendah. Penilaian tertinggi diperoleh kabupaten Bengkulu Utara dengan bobot skor 50%. Tujuh dari sepuluh kabupaten/kota lainnya sama sekali tidak ada menyajikan unit analisis pada pengukuran atau penilaian akuntabilitas. Pelaporan keuangan tepat waktu telah disajikan pada *website* pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Utara dan Lebong. Sedangkan Kota Bengkulu menyajikan informasi keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), namun laporan keuangan yang disajikan hanya untuk tahun 2017. Kabupaten/kota lainnya secara manual telah menyusun dan melaporkan keuangan tepat pada waktunya, hanya laporan keuangan tersebut tidak disajikan dalam *website* pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan berikut:

“Periode pelaporan keuangan sesuai peraturan, kita alhamdulillah tetap sesuai dengan peraturan maksimal pelaporan tanggal 31 maret. Tahun berikutnya kita telah laporkan laporan keuangan tahun yang sebelumnya, bahkan untuk tahun 2018 kita serahkan tanggal 20 maret ke BPK RI.” (Bapak H dari BPKAD Kota Bengkulu)

“Kalau teknisnya sekitar 1,5 bulan tetapi yang lama ini kadang-kadang OPD dia belum setor (kalau susah masalah pajak). Biasanya mulai penyusunan 10 januari sampai 1 pebruari. Penyampaian ke BPK tahun lalu tanggal 22 maret, kalau untuk batas akhir per 31 maret.” (Bapak J dari BKD Kabupaten Kepahiang)

Setiap penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan transparan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal. BKD/BPKAD pemerintah kabupaten/kota Bengkulu sudah melaporkan secara berkala terkait laporan keuangan pemerintah daerah kepada pihak internal. Namun, untuk tingkat pertanggungjawaban kepada pihak eksternal masih sangat rendah. Hal ini terbukti bahwa hanya beberapa pemerintah daerah saja yang telah menyajikan informasi keuangan pada *website* pemerintah daerah kabupaten/kota

lainnya belum memanfaatkan media *website* untuk menampilkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau pertanggungjawaban untuk pihak internal ada, pihak yang mendapatkan atas laporan keuangan yaitu Gubernur, Bupati, Inspektorat, dan Kementerian Keuangan. Kalau untuk pihak eksternal belum ada.” (Ibu E dari BPKD Kabupaten Seluma)

“Kami melaporkan setiap setelah audit. Data dikirim ke BPK RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.” (Ibu M dari BKD Kabupaten Bengkulu Tengah)

Pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum menyajikan informasi keuangan ke dalam *website* mungkin disebabkan rendahnya tingkat partisipasi atau permintaan masyarakat terhadap informasi keuangan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah tidak merasa wajib untuk melaporkan informasi keuangan ke dalam *website*. Sesuai dengan pernyataan informan berikut :

“Selama ini belum ada pihak eksternal meminta laporan keuangan pemerintah daerah.”
(Ibu M dari BKD Kabupaten Bengkulu Tengah)

Pemerintah daerah selaku pihak yang diberi amanat (agen) seharusnya menyampaikan hasil kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Baik atau buruk hasilnya harus tetap dilaporkan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak pemberi amanat (prinsipal). Pemerintah daerah kabupaten/kota Bengkulu diharapkan mampu mengoptimalkan penggunaan *website* sebagai wadah penyampaian hasil penyelenggaraan kepada masyarakat, baik informasi keuangan maupun kegiatan pemerintahan.

Aksesibilitas

Aksesibilitas laporan keuangan yaitu kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk memperoleh informasi keuangan dengan mudah dan biaya yang murah. Hal ini sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3 bahwa “setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. *Website* resmi pemerintah daerah diharapkan dapat mempermudah publik memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa perlu repot-repot mendatangi instansi pemerintah.

Hasil pengukuran/penilaian aksesibilitas hanya satu pemerintah daerah yang mendapatkan penilaian aksesibilitas dengan persentase 80% yaitu kabupaten Bengkulu Utara. *Website* pemerintah kabupaten Bengkulu Utara menyajikan 8 dari 10 unit analisis. Informasi-informasi yang tersedia pada *website* adalah wewenang Diskominfo selaku pihak yang mengelola, termasuk informasi keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Pihak yang mengunduh (informasi ke *website*) yaitu admin Diskominfo, termasuk laporan keuangan.” (Ibu N dari Diskominfo Kabupaten Seluma)

“Sementara ini masih Dinas Kominfo yang boleh mengunduh ke dalam *website* Kabupaten Kepahiang atas persetujuan Kepala Dinas Kominfo. Termasuk laporan keuangan, kita kerjasama dengan OPD nanti OPD membuat softcopy-nya, sudah siap untuk diupload baru kita upload.” (Bapak B dari Diskominfo Kabupaten Kepahiang)

Namun, jika organisasi perangkat daerah (OPD) yang bersangkutan telah memiliki *website* tersendiri maka informasi dapat langsung diunduh oleh OPD yang bersangkutan. Pernyataan ini sesuai berdasarkan wawancara dengan informan, berikut kutipan wawancaranya :

“Kalau khusus informasi keuangan, kami membangun *website* E-Sakip untuk memenuhi kebutuhan dari penyampaian informasi Restra, Lakip, dan sebagainya. Ketika *website* sudah jadi lalu kami serahkan ke pengelola kontennya yaitu ORTALA. Jadi untuk informasi yang sudah di upload/unduh diserahkan kepada pengelola konten. Jadi intinya Diskominfo hanya membangun fitur *website*.” (Ibu S dari Diskominfo Kota Bengkulu)

Unit analisis yang paling umum tersedia yaitu *website* ditemukan pada halaman pertama *google* daat mengetik nama pemerintah daerah, tersedia mesin pencarian (*search engine*), dan kontak person berupa telp/e-mail. Kontak person berupa telp/e-mail bertujuan agar masyarakat dapat bertanya atau menanggapi atas informasi yang disajikan pada *website*. namun terkait pertanyaan dan keluhan masyarakat, pihak Diskominfo selaku pengelola *website* pemerintah daerah sudah, menyediakan aplikasi e-Lapor yang dapat diakses melalui tautan lapor.go.id. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk tanggapan perihal tersebut (pertanyaan dan keluhan) masyarakat dapat memberikan tanggapan melalui aplikasi e-Lapor yang dapat diakses melalui tautan lapor.go.id, untuk tindak lanjutnya akan diteruskan ke SKPD terkait.” (Bapak A dari Diskominfo Kabupaten Bengkulu Utara).

Kualitas *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu yang masih rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum transparan mengungkapkan informasi kepada publik khususnya informasi keuangan. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penyelenggaraan pemerintahan kepada publik belum maksimal, serta kemudahan akses yang diberikan kepada publik melalui media *website* juga masih rendah sehingga masyarakat memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi yang diinginkan. Sehingga masyarakat umum masih belum merasakan manfaat yang signifikan dari adanya *website* pemerintah daerah.

Hal ini disebabkan karena tidak adanya kebijakan atau peraturan yang jelas dari pemerintah daerah tentang publikasi laporan keuangan. Ketidakjelasan peraturan tersebut membuat publikasi laporan keuangan hanya bersifat sukarela, artinya tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah menyajikan secara terbuka kepada masyarakat mengenai informasi keuangan. Kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap pentingnya laporan keuangan, padahal publikasi informasi keuangan melalui media *website* bisa menjadi sarana pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian yang telah dilakukan terhadap 10 *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu, belum ada satupun *website* pemerintah daerah yang memperoleh kategori berkualitas. Pengukuran atau penilaian *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu, dua diantaranya memperoleh kategori penilaian cukup berkualitas, satu *website* memperoleh kategori penilaian kurang berkualitas, dan tujuh *website* memperoleh kategori penilaian tidak berkualitas.

Implementasi e-government dalam bentuk website diharapkan sebagai wadah penyampaian informasi kepada publik dan peningkatan pelayanan publik, namun belum seluruhnya tercapai karena masih banyak unit analisis atau kriteria yang mendapat skor 0.

Inpres No. 3 Tahun 2003 menuntut adanya perubahan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, membuka peluang pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi secara cepat dan akurat. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Bengkulu belum secara maksimal memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pemerintahan (e-government) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan aksesibilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Saran

1. Bagi pemerintah, hendaknya informasi pada website tidak hanya berita kegiatan pemerintahan dan kegiatan kepala daerah, namun juga memuat informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan maupun informasi keuangan daerah. Sehingga perlu dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap informasi yang disediakan dalam website. Kalau perlu diberikan sanksi bagi website pemerintah daerah yang tidak transparan dan akuntabel sehingga website dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya.
2. Pemerintah daerah harus segera menetapkan kebijakan atau peraturan daerah terkait publikasi laporan keuangan dalam website agar tidak ada lagi alasan sehingga informasi keuangan dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
3. Diadakannya pelatihan terhadap sumber daya manusia yang mengelola website pemerintah daerah secara berkala agar pelaksanaan dan pengembangan e-government berjalan dengan optimal.
4. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan website agar masyarakat secara aktif dalam memberikan aspirasi sehingga pengembangan dan pemanfaatan website dapat dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Henri; Arza, Fefri Indra. (2019). *Potrait of Accountability and Transparency in Local Budget Management by the Regional Government in West Sumatera Province, Indonesia: An Anomaly in Digital Era*. 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019). Padang. 154-166.
- Agustin, Henri. (2014). *Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat*. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta.
- .Afriansyah, Rahmad Dian & Haryanto. 2013. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet Oleh Pemerintah Daerah*. Diponegoro Journal of Accounting, Vol.2 (3), 1-11.
- Eugene f. Brigham & Joel f. Houston. 2001. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama Yogyakarta: BPFE.
- Isni, Alisha Rahmadina. 2018. *Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Se-Sumatera Barat*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.

- Jensen, M. C., & Meckling W. H. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics.
- Kharisma, Yurisdicte C. 2018. *Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah Pada Kota Sumatera Barat*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
- Khasanah, dkk. 2017. *Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting (IFR) Pemerintah Ibu Kota Propinsi di Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XX Jember 2017.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Laswad, Fawzi, et al. 2005. *Determinant of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities*. Journal of Accounting and Public Policy, 24: 101-121.
- Mansyur, Firdaus. 2014. *Kinerja Website Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia*. Jurnal Pekommas, Vol.17 No.1, April 2014: 9-14.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Martani, Dwi, dkk. 2013. *Transparansi Keuangan dan Kinerja Pada Website Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Jurnal Proceeding PESAT Vol. 5, Oktober 2013.
- Martani, Dwi & Rahim, Wanda Mustika. 2015. *Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetensi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, Dan Karakteristik Demografi Terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non-Keuangan Website Pemerintah Daerah*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Mootik, Suryani Sidik. 2003. *Transparansi, Akuntabilitas dan Minat Berinvestasi*. Jurnal Forum Inovasi Capacity Building and Good governance . Vol-8: September-November 2003.
- Nosihana, Ariefia & Yaya, Rizal. 2016. *Internet Financial Reporting Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis Vol.3 No.2, 2016, pp 87-110.
- Novia, Siswita; Arza, Fefri Indra; Agustin, Henri. (2015). *Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang (Studi Empiris pada DPRD dan SKPD Kota Padang)*. Jurnal WRA, 3(1), 529-548.
- Puspita, R., & Martani, D. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin, 20-22 September 2012.
- Republik Indonesia. 2000. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pemerintahan Yang Baik*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengungkapan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7A Tahun 2007. Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2003. *Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Pemerintah Indonesia.

- Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol. 9. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sagala, Marjuki. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan*. Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sanjaya, dkk. 2014. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah*. Jurnal Ekonomi Volume 2 No. 1, Tahun 2014.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sinaga, Y. F. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Di Internet Secara Sukarela Oleh Pemerintah Daerah*. Diambil Dari: <http://eprints.undip.ac.id/28576/1/Skripsi7.pdf> (12 April 2019).
- Sofia, Altira & Husen, Bagus. 2013. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Melalui Pengungkapan Informasi Website*. Jurnal Manajemen Indonesia. Vol.12 No.4. April 2013.
- Sosiawan, Edwi Arief. 2008. *Tantangan dan Hambatan Dalam Implementasi E-government di Indonesia*. Seminar Nasional Informatika, UPN Veteran Yogyakarta.
- Styles, et al. 2007. *The Accessibility of Financial Reporting U.S Municipalities on The Internet*. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*. Journal Of Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol. 19, No. 1, 56-92.
- Tjokromidjojo, H. Bintoro. 2003. *Reformasi Nasional dan Penyelenggara Good governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*. Jakarta.
- Verawaty. 2015. *Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah Indonesia*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XVIII Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2016.
- Wikipedia. 2019. *Daftar Jumlah Kabupaten dan Kota di Bengkulu*. Diambil Dari: <http://www.wikipedia.org> (2 April 2019).